

Format Usulan Program RAN OGI VII 2023-2024

Negara			
Nomor dan Nama Komitmen	Optimalisasi Implementasi Keterbukaan Data Beneficial Ownership Melalui Penguatan Verifikasi dan Pemanfaatan Data Beneneficial Ownership		
Deskripsi Singkat Komitmen	<i>Data Beneficial Ownership yang mutakhir dan terverifikasi untuk memenuhi implementasi keterbukaan data beneficial ownership</i>		
Pengusul Komitmen	Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Auriga Nusantara Transparency International (TI) Indonesia Indonesia Corruption Watch (ICW)		
Pemangku Kepentingan	Kementerian/ Lembaga (K/L)	Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)	Aktor Lainnya (Parlemen, Sektor Privat, dll)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Nasional Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 3. Kementerian ESDM 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 5. Kementerian Pertanian 6. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 7. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/Badan Pertanahan Nasional 8. Kementerian Keuangan 9. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 10. Kementerian Perdagangan 11. Komisi Pemberantasan Korupsi 12. Lembaga Kebijakan, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 13. Otoritas Jasa Keuangan 14. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 		
Jangka Waktu	Januari 2023 – Desember 2024		

Identifikasi Masalah

1. Masalah apa yang ingin diselesaikan melalui komitmen ini?

Siapa yang terpengaruh? Di mana masalah ini terjadi? Bagaimana mereka terpengaruh? Kapan mereka paling terpengaruh? Kapan masalah ini mulai? Berapa lama masalah tersebut telah mempengaruhi kelompok/individu yang terpengaruh?

Dalam satu dekade terakhir, isu keterbukaan data/informasi mengenai kepemilikan manfaat korporasi, atau Beneficial Ownership (BO) terus menguat dan mengundang ketertarikan pihak pemerintah, lembaga pembiayaan, perbankan dan juga kalangan korporasi sendiri. Keterbukaan data/informasi BO diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi dengan mengurangi risiko finansial bagi investor dan sekaligus menciptakan iklim bisnis yang adil. Praktek keterbukaan data/informasi BO kepada publik di berbagai negara telah menunjukkan adanya preseden dalam meminimalkan risiko penyalahgunaan korporasi sekaligus mendorong pencegahan dan penanganan kejahatan keuangan dan korupsi yang dapat merugikan korporasi itu sendiri, publik maupun iklim dan kepercayaan investor.

Di Indonesia, Payung hukum pelaksanaan pengungkapan BO di Indonesia telah diterbitkan pada Maret 2018 melalui Peraturan Presiden (Perpres) nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Melalui sinergi antar sejumlah inisiatif antara lain Open Government Indonesia (OGI), Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI), Financial Act Task Force (FATF) dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dengan dukungan berbagai stakeholder termasuk masyarakat sipil, transparansi BO terus didorong implementasinya. Tahun 2018-2020, pelaksanaan aksi transparansi BO diarahkan pada penguatan kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan. Selanjutnya, pada tahun 2020-2022, aksi BO diarahkan pada penguatan basis data BO, akses publik terhadap basis data serta pemanfaatan data BO untuk perizinan, pengadaan barang dan jasa, dan penegakan hukum.

Namun, data Beneficial Ownership yang ada masih belum terverifikasi kebenaran dan keakuratannya oleh pemerintah. Hal ini tentu dapat menimbulkan pertanyaan lanjutan terkait validitas data BO yang disediakan oleh pemerintah dan pihak swasta.

2. Apa penyebab permasalahan tersebut?

Jabarkan pemahaman Anda tentang penyebab masalah tersebut. Sebaik mungkin, identifikasikan akar permasalahannya. Gunakan alat analisis masalah (cth: problem tree, five whys, diagram fishbone, atau metode terkait lainnya) jika diperlukan dan sertakan bukti saat memungkinkan.

1. Sejumlah Kementerian/Lembaga yang menjadi penanggung jawab aksi belum memiliki basis data BO serta regulasi yang mewajibkan untuk deklarasi BO ketika proses perizinan
2. Kewajiban untuk deklarasi BO belum menjadi penapis dalam proses perizinan
3. Kendala administratif (belum adanya Memorandum of Understanding/MoU dan PKS) maupun teknis (pertukaran data melalui sistem) masih dihadapi oleh Kementerian/Lembaga
4. Kepatuhan korporasi masih rendah karena ketiadaan sanksi

5. Belum berjalannya mekanisme verifikasi data yang dideklarasikan oleh korporasi yang berdampak pada kualitas data
6. Minimnya peran serta masyarakat

Deskripsi Komitmen

1. Apa yang telah dilakukan sejauh ini untuk mengatasi permasalahan tersebut?

Solusi apa yang telah diupayakan untuk masalah ini di tahun-tahun sebelumnya? Seberapa sukses upaya tersebut?

Evaluasi pelaksanaan Renaksi 2018-2020 dan 2020-2022 yang sejauh ini sudah mengalami kemajuan dengan dibukanya data BO maupun data BO sebagai syarat dalam pengajuan izin di sektor ekstraktif.

2. Solusi apa yang diusulkan?

Apa yang akan dilakukan untuk memecahkan permasalahannya? Bagaimana solusi ini berbeda dengan upaya-upaya sebelumnya? Dalam cara apa solusi ini akan memecahkan permasalahannya? Bagaimana solusi ini akan memecahkan permasalahannya? Apakah solusi ini akan memecahkan permasalahannya secara keseluruhan atau sebagian? Bagian apa dari masalah akan dipecahkan melalui solusi, jika tidak dipecahkan secara keseluruhan?

Upaya penguatan dan pemanfaatan keterbukaan data BO ini juga ditujukan bagi terselenggaranya agenda pembangunan yang sejalan dengan SDGs sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Oleh karena itu, perlu keterbukaan dan verifikasi data Beneficial Ownership untuk mendukung berbagai agenda pembangunan yang transparan dan mendukung pencegahan korupsi.

3. Hasil apa yang ingin dicapai dengan mengimplementasi komitmen ini?

Output apa yang ingin dihasilkan? Perubahan apa dalam pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas yang ingin dicapai? Perubahan apa dalam perilaku, sistem, dan praktik yang ingin dihasilkan?

Keterbukaan dan pemanfaatan data Beneficial Ownership yang datanya terverifikasi, mutakhir, dan terintegrasi.

Analisa Komitmen

Pertanyaan	Jawaban (jika tidak berlaku, isi dengan N/A)
1. Bagaimana komitmen ini akan mendorong transparansi? <i>Bagaimana komitmen ini akan meningkatkan akses masyarakat</i>	Melalui transparansi beneficial ownership (BO), individu yang teridentifikasi sebagai pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner) dan memiliki rekam jejak yang buruk atau

<p><i>terhadap informasi dan data? Bagaimana komitmen ini akan membuat pemerintah lebih transparan terhadap masyarakat?</i></p>	<p>dinilai berisiko tinggi untuk melakukan suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi, pencucian uang maupun terorisme, maka langkah-langkah mitigasi risiko penyalahgunaan korporasi dapat diterapkan.</p> <p>Transparansi BO sangat bermanfaat dalam proses perizinan, khususnya untuk membantu instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan uji tuntas (<i>due diligence</i>).</p> <p>Data BO yang melakukan permohonan izin juga dapat digunakan untuk mendeteksi hubungan afiliasi antara korporasi yang melakukan permohonan izin dengan instansi pemerintah yang menerbitkan izin.</p>
<p>2. <i>Bagaimana komitmen ini akan menumbuhkan akuntabilitas? Bagaimana komitmen ini akan membantu institusi publik menjadi lebih akuntabel terhadap masyarakat? Bagaimana komitmen ini akan memfasilitasi kemampuan masyarakat untuk mempelajari kemajuan dari implementasi? Bagaimana komitmen ini akan mendukung sistem monitoring dan evaluasi yang transparan?</i></p>	<p>Komitmen ini akan mendukung nilai Keterbukaan Pemerintah yakni transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Komitmen ini sejalan dengan RPJMN 2020-2024 yakni Program Administrasi Hukum Umum terutama kebijakan pendukung penyusunan Naskah Akademik (NA) RUU Badan Usaha.</p> <p>Selain itu, komitmen ini berkaitan dengan target SDGs No. 17: "Memperkuat implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan", terutama pada target 17.1: "memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional ke negara- negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas domestik untuk pajak dan pengumpulan pendapatan lainnya".</p>
<p>3. <i>Bagaimana komitmen ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendefinisikan, mengimplementasikan, dan memonitor solusi? Bagaimana komitmen ini akan melibatkan masyarakat dan kelompok masyarakat secara proaktif?</i></p>	<p>Melalui penelusuran BO, masyarakat dapat menilai apakah seorang pejabat publik berkomitmen untuk bekerja demi mensejahterakan rakyatnya, meninggalkan bisnisnya serta tidak berupaya untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perusahaan yang dahulu ia kendalikan.</p>

Perencanaan Komitmen			
<i>(Ini proses perencanaan awal yang melihat ukuran keberhasilan dan output yang diharapkan, serta pemangku kepentingan utama yang terlibat.)</i>			
Ukuran Keberhasilan <i>(Ukuran Keberhasilan adalah bagian dari serangkaian tindakan atau peristiwa yang, ketika dijalankan, akan mengarah pada pencapaian hasil yang ingin dicapai komitmen.)</i>	Output yang Diharapkan <i>(Output adalah hasil konkret, dapat diverifikasi secara obyektif yang merupakan produk langsung dari kegiatan</i>	Tanggal Penyelesaian yang Diperkirakan	Pemangku Kepentingan

	<i>yang dilaksanakan atau diimplementasikan.)</i>				
Cleansing/pembersihan data	1. Tersedianya standar data BO 2. Perbaikan data BO dengan menyangdingkan data BO di Ditjen AHU dengan data Legal Owner (data AHU online), data NIK dari Kemendagri, NPWP, maupun BO dari K/L 3. Pertukaran data K/L dengan Kemenkumham	1 Januari 2023 - 31 Desember 2023	Penanggungjawab Utama:		
			<u>Pemangku Kepentingan Pendukung</u>		
			K/L	OMS	Others (e.g., Parliament, Private Sector etc)
Verifikasi Data		1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	Penanggungjawab Utama:		
			<u>Pemangku Kepentingan Pendukung</u>		
			K/L	OMS	Others (e.g., Parliament, Private Sector etc)
Pemanfaatan Data BO		1 Januari 2022 – 31 Desember 2024			